BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan teknis dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Dokumen ini menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, penyusunan dokumen perencanaan ini juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang,

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Dinas Sosial mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen perencanaan ini berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program/kegiatan yang dijalankan Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang- undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah No. 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 , yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta;
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program–program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta antara lain:

1. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA dan DPA SKPD
2. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta tahun 2018.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB l PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta

BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Yogyakarta termuat dalam Tabel 2.2 lampiran dokumen ini. Dari tabel tersebut tampak bahwa seluruh target yang ditetapkan tercapai. Bahkan terdapat indikator kinerja yang capaiannya lebih dari seratus persen, yakni persentase PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar skala kota, persentase PMKS dalam 1 tahun skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis dan persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial. Capaian kinerja indikator persentase PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar skala kota sebesar 101 persen. Indikator persentase PMKS dalam 1 tahun skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya membukukan capaian kinerja sebesar 125 persen. Sedangkan indikator persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial capaian kinerjanya sebesar 177 persen.

Capaian kinerja diatas menunjukkan bahwa organisasi ini dapat bekerja efektif dan efisien ditengah berbagai hambatan dan kendala seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, sifat kegiatan yang pelaksanaannya tergantung pada kondisi tertentu (permintaan,

orang yang meninggal, orang yang terlantar dan lain-lain), adanya kegiatan yang masuk dalam anggaran perubahan dan kegiatan yang termasuk bansos sehingga harus melalui proses pengajuan proposal, dimana ternyata ada target yang belum mengumpulkan proposal sampai tenggang waktu yang ditentukan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2 lampiran dokumen ini menunjukkan capaian kinerja Dinas Sosial yang cukup baik. Capaian kinerja tersebut melampaui target yang ditetapkan sekaligus standar pelayanan minimal (SPM). Keberhasilan Dinas Sosial tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan ekternal. Faktor internal yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Dinas Sosial antara lain :

a. Ketersediaan pranata hukum, yakni Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan hukum lainnya.
b. Kepatuhan pada perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
c. Kemampuan teknis yang dimimiliki oleh pegawai Dinas Sosial
d. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional yang jelas
e. Penerapan asas-asas pelayanan publik secara konsekuen

Sedangkan faktor eksternal yang mendukung keberhasilan kinerja Dinas Sosial antara lain :

a. Adanya kebijakan dan keberpihakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial
b. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait
c. Tersedianya Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memadai
d. Partisipasi masyarakat dalam menyusun program kerja pembangunan kesejahteraan sosial
e. Partisipasi masyakat dalam memberikan masukan dan umpan balik atas kinerja yang dilakukan lembaga
f. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala

Meskipun faktor-faktor diatas berpengaruh positif terhadap kinerja Dinas Sosial, bukan berarti pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial berjalan tanpa hambatan. Berubahnya aturan dan kebijakan dalam pemberian layanan menjadi salah satu hambatan. Disisi lain,

masyarakat acapkali kurang memahami prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan layanan. Ditambah pula dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi prosedur dan persyaratan layanan yang telah ditentukan. Fakto-faktor tersebut menjadi penghambat Dinas Sosial untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Mengingat target kinerja telah berhasil dilampui oleh Dinas Sosial, maka Dinas Sosial dapat menetapkan target kinerja yang baru. Target kinerja tersebut disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang ditemukan di Kota Yogyakarta. Penetapan target kinerja yang baru menjadi salah satu upaya Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada sekaligus meningkatkan performa kinerja lembaga.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Produk hukum tersebut menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial menjadi salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunitas yang memerlukan pelayanan sosial disebabkan mereka mempunyai hambatan, masalah dan gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Keberadaan masalah sosial di Kota Yogyakarta merupakan kenyataan bersama yang dirasakan hingga saat ini, sebagai akibat negatif dari perkembangan sebuah kota. Kota Yogyakarta sebagai kota urban tidak pernah sepi dari permasalahan anak jalanan, warga terlantar, gelandangan, pengemis dan permasalahan sosial lainnya. Penanganan bagi warga masyarakat yang rentan terhadap berbagai masalah sosial terus dilakukan oleh berbagai unsur terkait, baik oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat agar tidak menjadi beban kota. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengamanatkan empat hal pokok yakni rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Produk hukum tersebut menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan

Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, saat ini tercatat ada 25 jenis PMKS. Dinas Sosial menjadi salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunitas yang memerlukan pelayanan sosial disebabkan mereka mempunyai hambatan, masalah dan gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Kondisi yang perlu mendapat perhatian terkait dengan kesejahteraan sosial adalah penduduk yang mengalami kerentanan sebagai akibat dari permasalahan fisik/disabilitas, ketidakberdayaan karena usia gender dan sosial, ketiadaan kesempatan untuk melakukan investasi diri, kejadian bencana, eksploitasi serta guncangan ekonomi akibat bencana. Kelompok penduduk ini meliputi penyandang disabilitas, anak, perempuan, lanjut usia dan korban bencana, serta penduduk miskin dan rentan produktif yang terkendala kerentanan tertentu.

Permasalahan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas diantaraya terkait dengan penyediaan infrastruktur, aksesibilitas dan tenaga pendamping yang kompeten. Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, di Kota Yogyakarta dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tugas Komite ini adalah melakukan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, juga melaksanakan mediasi dan advokasi antara penyandang disabilitas dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat kelompok marjinal dan rentan. Permasalahan ini cenderung dilihat pada upaya penduduk dalam memenuhi kebutuhan. Jika pemikiran tersebut terus menjadi pedoman, maka kebijakan afirmatif apapun tidak efektif mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan antara penduduk yang kaya dan miskin. Sebab, program yang ada hanya diarahkan untuk pemberian bantuan (asistensi) kepada penduduk untuk memenuhi kebutuhan. Pola ini memiliki dampak

negatif yakni membentuk mental mengandalkan bantuan dari pihak lain untuk mengatasi permasalahan dirinya. Terbukti, hingga saat ini Dinas Sosial masih sering menerima pengaduan adanya warga mampu yang menerima bantuan yang ditujukan untuk warga miskin.

Program yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan tetap perlu dilakukan, namun hanya untuk penduduk yang benar-benar miskin dan rentan. Program tersebut menjadi perwujudan perlindungan sosial agar kelompok miskin dan rentan terlindungi pemenuhan kebutuhan pokoknya. Upaya perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan untuk mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Sedangkan bagi warga yang potensial, program yang ditujukan bagi mereka adalah program yang mampu mengangkat dan mengatasi kemiskinan secara mandiri dan mendasar. Perlu formulasi program yang mengarah pada perubahan individu, keluarga dan penduduk. Bukan hanya pada bagaimana kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup semata. program yang dirancang mengarah pada membangun kesadaran untuk mendorong kemandirian dan akses keluar dari kriteria PMKS dan atau kemiskinan/ kerentanan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari sisi jumlah dan nama program/kegiatan, tidak ada perbedaan ataupun perubahan terhadap rancangan awal RKPD. Dinas Sosial Kota Yogyakarta melaksanakan 6 program yang terdiri dari 3 program pelayanan internal dan 3 program pelayanan teknis bidang sosial. Tiap-tiap program dijabarkan kedalam beberapa kegiatan. Program pelayanan internal meliputi Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Sedangkan program pelayanan teknis bidang sosial antara lain Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial dan Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial.

Pagu indikatif yang telah dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan mengalami perbedaan. Sebagian diantaranya mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan pagu indikatif dalam rancangan awal RKPD belum mampu mengcover keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi atau mencapai target kinerja. Pada sebagian kegiatan terdapat

indikator kinerja yang baru. Indikator kinerja inilah yang membutuhkan alokasi tambahan anggaran.

Pada kegiatan Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial terdapat dua indikator kinerja yang baru yakni Jasa Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai dan Jasa Pelayanan Pengaduan Subsidi Listrik. Kedua indikator tersebut muncul sebagai respon atas perkembangan yang terjadi. Di tingkat nasional, terdapat kebijakan terkait bantuan pangan non tunai dan pengurangan subsidi listrik. Kebijakan tersebut berlaku diseluruh Indonesia. Oleh karenanya perlu dijalankan pula oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial. Adanya indikator kinerja baru tersebut membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 138.105.200. Total anggaran yang dibutuhkan Kegiatan Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial sebesar Rp 817.838.750.

Pada Kegiatan Rehabilitasi PMKS terdapat indikator kinerja baru yakni ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) yang mengikuti penguatan sosial psikologis. Munculnya indikator tersebut merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan terkait ODHA. Sebagaimana umum diketahui, salah satu dampak negatif dari perkembangan Kota Yogyakarta adalah keberadaan ODHA sebagai akibat dari perilaku hidup yang menyimpang dari norma sosial. Munculnya indikator kinerja tersebut berkonsekuensi pada perlunya tambahan anggaran. Anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh Kegiatan Rehabilitasi Sosial sebesar Rp 699.075.700. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pagu indikatif semula Rp 412.605.200. Tambahan anggaran juga digunakan untuk sub kegiatan petugas jaga di titik rawan anak jalanan.

Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 152.318.305 dari pagu indikatif semula sebesar Rp 860.901.495. Tambahan anggaran digunakan untuk membiayai tercapainya indikator kinerja baru yakni Jasa Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA. Dengan demikian, total anggaran yang dibutuhkan Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar Rp 1.013.219.800.

Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 79.016.865 dari pagu indikatif semula Rp 1.140.054.435. Pada kegiatan ini terdapat indikator kinerja baru yakni data penyandang disabilitas termutakhir. Oleh karenanya, diperkirakan

Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS membutuhkan total anggaran sebesar Rp 1.219.071.300.

Pada Kegiatan Pemberdayaan PSKS juga terdapat indikator kinerja baru yakni Laporan Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan. Kegiatan ini membutuhkan total anggaran sebesar Rp 706.998.600. Jumlah tersebut Rp 6.177.330 lebih tinggi dari pada pagu indikatif semula sebesar Rp 700.821.270.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Renja Dinas Sosial Kota Yogyakarta tahun 2018 telah dimasukkan juga beberapa usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan. Usulan yang berasal dari masyarakat yang diterima Dinas Sosial Kota Yogyakarta semuanya memiliki dasar prioritas tertentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Namun dengan tetap mempertimbangkan prioritas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan sosial.

Usulan-usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan yang diusulkan melalui musyawarah rencana pembangunan bisa dilihat dalam Tabel.2.1 lampiran dokumen ini. Yang tercantum dalam tabel tersebut adalah keseluruhan usulan baik yang telah diakomodir dalam kegiatan maupun yang belum tercover karena tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial Kota Yogyakarta maupun karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM yang mengkibatkan beberapa usulan dari para pemangku kepentingan tidak semua bisa terakomodir. Usulan-usulan kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut diakomodir melalui belanja langsung pada kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial maupun bantuan sosial dan hibah.

Usulan kegiatan yang diakomodir melalui belanja langsung pada kegiatan diantaranya Pembinaan WKSBM, Pelatihan Pengurus Karang Taruna, Sosialisasi PSM, BOP Lansia, Peningkatan Kapasitas Anggota Kelurahan Siaga Bencana (KSB), Pelatihan Keterampilan untuk Disabilitas, Fasilitasi Lembaga Lansia, Fasilitasi IPSM, Pertemuan Rutin IPSM, Gebyar Hari Lansia, Pembinaan Keluarga Penyandang Disabilitas.

Sedangkan usulan yang diakomodir melalui belanja hibah dan bantuan sosial antara lain alat bantu bagi difabel seperti kursi roda, alat bantu dengar, pengembangan UEP LUT

(Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Terlantar) dan biaya operasional perkumpulan lansia Giat Lansia Wredhotomo.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta untuk periode satu tahun anggaran antara lain :

a. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dibidang sosial,
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesejahteraan sosial,
c. Memantapkan peran dan fungsi Dinas Sosial dalam koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial didaerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah:

a. Meningkatkan kualitas mekanisme sistem perencanaan kerja yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel,
b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung layanan kesejahteraan sosial
c. Memantapkan koordinasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dengan para pemangku kepentingan.
d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2018.
e. Menjadikan acuan kerja bagi seluruh seksi/sub bagian/bidang/UPT di lingkup Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

f. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematif yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Sosial Kota Yogyakarta menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

1. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari tiap seksi dan bagian tata usaha;
2. Memperhatikan program pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
3. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya visi dan misi.

Program dimaksud oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah disusun sebagai berikut:

PROGRAM/ KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
b. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Kegiatan Perlindungan Sosial
b. Kegiatan Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial
c. Kegiatan Pelayanan Anak di RPA Wiloso Projo

d. Kegiatan Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma

5 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial

a. Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

b. Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

6. Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial

a. Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS

b. Kegiatan Pemberdayaan Potensi PSKS

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2018 diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta ini menjadi bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Tahun 2018.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan Kepala SKPD mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA YOGYAKARTA

Hadi Muhtar, S.E.,M.M.
NIP. 19570824 198212 1 001

Tabel.3.1
Rumusan Rencana Program dan Perkiraan Maju

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Indikatif (2018)	Prakiraan Maju (2019)	Jenis Keg	Penanggungjawab
	2	6	12	13	14	15
	Urusan					
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**1.195.633.510**	**1.315.196.861**	**Sedang berjalan**	**Sekretariat**
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	226.770.000	249.447.000		
		Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi				
		Makan dan minum yang tersedia untuk tamu				
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000	651.521.798	716.673.978		
		Materai 3000				
		Jasa pengiriman/paket				
		STNK Roda 4 yang terbayar				
		STNK Roda 3 yang terbayar				
		STNK Roda 2 yang terbayar				
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia				
		Jasa kebersihan kantor				
		Jasa tenaga keamanan				
		Alat Tulis Kantor yang tersedia				
		Jasa Percetakan				
		Jasa Penggandaan				
		Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia				
		Pembayaran telepon				
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia				
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia				
		Jasa perbaikan perlengkapan kerja				
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor	1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	317.341.712	349.075.883		
		2. Dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia				
		3. Jasa Tenaga Bantuan				
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**714.115.670**		**Sedang Berjalan**	**Sekretariat**
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	202.522.600	222.774.860		
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 4	511.593.070	562.752.377		
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 3				
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan Tolok Ukur	Pagu Indikatif (2018)	Prakiraan Maju (2019)	Jenis Keg	Penanggungjawab
	2	6	12	13	14	15
3	**Program Peningkatann Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**74.750.000**	**82.225.000**		**Sekretariat**
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD	1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renja, PK, RKA, DPA)	74.750.000	82.225.000		
		2. Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, Profil)				
4	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**		**1.572.529.755**	**1.729.782.731**	**Sedang berjalan**	**Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**
	Kegiatan Perlindungan Sosial	1. Jumlah anak panti asuhan se Kota Yk yg mengikuti forum kreativitas	766.977.900	843.675.690		
		2. Laporan Hasil evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana Bantuan Korban Bencana				
		3. Jasa piket Tagana				
		4. Lanjut Usia Potensial yang mendapat pembinaan				
		5. Jasa Komunikasi Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial				
		6. Laporan Pelaksanaan Gebyar Hari Lanjut Usia Kota Yogyakarta				
		7. Laporan Pelaksanaan workshop Komisi Daerah Lansia				
		8. Pelatihan Tagana				
	Kegiatan Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial	1. Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Asistensi Sosial	-	-		
		2. Jasa Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)				
		3. Jasa Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)				
		4. Santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS yang diberikan				
		5. Jasa Pelayanan Mobil Jenazah				
		6. Jenazah Terlantar Yang Dimakamkan				
		7. Jasa Fasilitator Pengaduan Subsidi Listrik				
		8.Jasa Pemulangan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dalam Perjalanan di Kota Yogyakarta				
	Kegiatan Pelayanan Anak di RPA Wiloso Projo	Anak terlantar yang dilayani	853.483.100	938.831.410		
	Kegiatan Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma	Lanjut usia yang dilayani	(47.931.245)	(52.724.370)		
5	**Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial**		**1.712.295.500**	**1.883.525.050**	**Sedang berjalan**	**Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial**
	Kegiatan Rehabilitasi PMKS	1. Penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha	699.075.700	768.983.270		
		2. Keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha				
		3. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha				
		4. Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan Tolok Ukur	Pagu Indikatif (2018)	Prakiraan Maju (2019)	Jenis Keg	Penanggungjawab
	2	6	12	13	14	15
		5. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha				
		6. Anak rentan hidup di jalan yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha				
		7. Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis				
		8. Anak jalanan yang mendapatkan motivasi				
		9. Gelandang pengemis yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha				
		10. Perempuan rawan sosial ekonomi yang mengikuti pelatihan				
		11. Penyandang sakit jiwa yang dikirim ke RS Jiwa				
		12. ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis				
	Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	1.013.219.800	1.114.541.780		
		2.				
		2. Permohonan alat bantu bagi penyandang disabilitas				
		3. Anak terlantar yang ditangani dan rekomendasi yang diberikan untuk pengangkatan anak				
		4. Surat rekomendasi bagi PMKS				
		5. Advokasi penanganan PMKS				
		6. KUBE FM yang memperoleh Pembinaan Lanjut (binjut)				
		7. Jasa KIE KUBE, USEP dan pendamping				
		8. Jasa Pendampingan KUBE dan USEP				
		10. Peringatan Hari Disabilitas Internasional				
		11. Jasa Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA				
6	**Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial**		**1.926.069.900**	**2.118.676.890**	**Sedang berjalan**	**Bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial**
	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS	1. Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	1.219.071.300	1.340.978.430		
		2. Data base PSKS				
		3. Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi				
		4. Data base Penyandang Disabilitas				
	Kegiatan Pemberdayaan Potensi PSKS	1. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Dasar	706.998.600	777.698.460		
		2. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Lanjut				
		3. Pengurus Karang Taruna yang mendapat pelatihan				
		4. Anak tidak mampu yang ikut sunatan massal/HKSN				
		5. PSM, Karang Taruna, LKS, TKSK berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta				
		6. Optimalisasi PSKS dengan :				
		- Peserta Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial				
		- Karang Taruna yang dibina				
		- PSM yang dibina				
		- LKS yang dibina				
		- WKSBM yang dibina				
		- TKSK yang dibina				
		- Peserta Workshop PSKS				
		- Laporan Pendampingan LOTA Kota Yk				
		7. KIE LKS Panti se Kota Yogyakarta				
		8. Peseta Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan				
		Uraian				
	HIBAH DAN BANSOS		**889.250.000**	**889.250.000**		
	Bansos		**761.250.000**	**761.250.000**		
	IPSM Kota Yk		***227.500.000***	***227.500.000***		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan Tolok Ukur	Pagu Indikatif (2018)	Prakiraan Maju (2019)	Jenis Keg	Penanggungjawab
	2	6	12	13	14	15
	Bantuan untuk anak rentan hidup di jalan	20 orang x Rp 1.250.000	25.000.000	25.000.000		
	Bantuan untuk gelandangan pengemis	20 orang x Rp 1.250.000	25.000.000	25.000.000		
	Bantuan untuk anak klien Bapas	40 orang x Rp 1.250.000	37.500.000	37.500.000		
	Bantuan untuk peserta khitanan masal	100 orang x Rp 100.000	10.000.000	10.000.000		
	Fasilitasi alat bantu bagi disabilitas		30.000.000	30.000.000		
	Bantuan kepada KUBE yang mendapatkan pembinaan lanjutan	15 KUBE x Rp 15.000.000	100.000.000	100.000.000		
	FKKADK		***43.750.000***	***43.750.000***		
	Bantuan untuk keluarga dengan anak AD	40 orang x Rp 1.250.000	25.000.000	25.000.000		

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Nasional	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Ket	Catatan Analisis
					Th 2012	Th 2013	Th 2014	Th 2015	Th 2016	Th 2012	Th 2013	Th 2014	Th 2015	Th 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16		15
1	Meningkatnya penanganan masalah sosial dan terwujudnya kemandirian masyarakat di bidang sosial	Persentase PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar skala kota		80%	56%	62%	68%	74%	80%	50%	99,53%	26,91%	47,27%	101%		
2	Meningkatnya penanganan masalah sosial dan terwujudnya kemandirian masyarakat di bidang sosial	Persentase PMKS dalam 1 tahun skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		80%	45%	54%	63%	71%	80%	37%	100%	100%	100%	125%		
3	Meningkatnya penanganan masalah sosial dan terwujudnya kemandirian masyarakat di bidang sosial	Persentase panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,35%	100%	100%	100%		
4	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase WKSBM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		60%	52%	54%	56%	58%	60%	52%	50%	54,55%	63,64%	100%		
5	Meningkatnya penanganan masalah sosial dan terwujudnya kemandirian masyarakat di bidang sosial	Persentase korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Meningkatnya penanganan masalah sosial dan terwujudnya kemandirian masyarakat di bidang sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial		40%	26%	30%	33%	37%	40%	23%	14,98%	19,9%	22,90%	177%		

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
1	2	3		5	6	7	8		10	11	12
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Yk**	**Kelancaran administrasi perkantoran meningkat**	**100%**	**1.202.546.243**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Yk**	**Kelancaran administrasi perkantoran meningkat**	**100%**	**1.195.633.510**	
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	75 pegawai	233.168.000	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	75 pegawai	226.770.000	
			Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	50 kali				Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	50 kali		
			Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	29 kali				Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	29 kali		
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 laporan				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 laporan		
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Materai 6000	1.050 buah	662.783.033	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Materai 6000	1.050 buah	651.521.798	
			Materai 3000	1.950 buah				Materai 3000	1.950 buah		
			Jasa pengiriman/paket	100 paket				Jasa pengiriman/paket	100 paket		
			STNK Roda 4 yang terbayar	17 unit				STNK Roda 4 yang terbayar	17 unit		
			STNK Roda 3 yang terbayar	1 unit				STNK Roda 3 yang terbayar	1 unit		
			STNK Roda 2 yang terbayar	35 unit				STNK Roda 2 yang terbayar	35 unit		
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis				Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis		
			Jasa kebersihan kantor	12 bulan				Jasa kebersihan kantor	12 bulan		
			Jasa tenaga keamanan	8 orang				Jasa tenaga keamanan	8 orang		
			Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis				Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis		
			Jasa Percetakan	200 lembar				Jasa Percetakan	200 lembar		
			Jasa Penggandaan	330.000 lembar				Jasa Penggandaan	330.000 lembar		
			Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	29 jenis				Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	29 jenis		
			Pembayaran telepon	12 jenis				Pembayaran telepon	12 jenis		
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis				Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis		
			Peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis				Peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis		
			Jasa perbaikan perlengkapan kerja	3 jenis				Jasa perbaikan perlengkapan kerja	3 jenis		
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	32 jenis				Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	32 jenis		
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali				Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor		1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	12 bulan	306.595.210	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor		1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	12 bulan	317.341.712	
			2. Dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	12 bulan				2. Dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	12 bulan		
			3. Jasa Tenaga Bantuan	12 bulan				3. Jasa Tenaga Bantuan	12 bulan		
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Kelancaran administrasi perkantoran meningkat**	**100%**	**707.736.700**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Kelancaran administrasi perkantoran meningkat**	**100%**	**714.115.670**	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3		5	6	7	8		10	11	12
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	12 bulan	218.780.250	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	12 bulan	202.522.600	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 4	17 unit	488.956.450	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 4	17 unit	511.593.070	
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 3	1 unit				Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 3	1 unit		
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 2	35 unit				Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 2	35 unit		
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Yk**	**Kelancaran administrasi perkantoran meningkat**	**100%**	**1.202.546.243**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Yk**	**Kelancaran administrasi perkantoran meningkat**	**100%**	**1.195.633.510**	
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	75 pegawai	233.168.000	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	75 pegawai	226.770.000	
			Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	50 kali				Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	50 kali		
			Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	29 kali				Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	29 kali		
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 laporan				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 laporan		
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Materai 6000	1.050 buah	662.783.033	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Materai 6000	1.050 buah	651.521.798	
			Materai 3000	1.950 buah				Materai 3000	1.950 buah		
			Jasa pengiriman/paket	100 paket				Jasa pengiriman/paket	100 paket		
			STNK Roda 4 yang terbayar	17 unit				STNK Roda 4 yang terbayar	17 unit		
			STNK Roda 3 yang terbayar	1 unit				STNK Roda 3 yang terbayar	1 unit		
			STNK Roda 2 yang terbayar	35 unit				STNK Roda 2 yang terbayar	35 unit		
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis				Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis		
			Jasa kebersihan kantor	12 bulan				Jasa kebersihan kantor	12 bulan		
			Jasa tenaga keamanan	8 orang				Jasa tenaga keamanan	8 orang		
			Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis				Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis		
			Jasa Percetakan	200 lembar				Jasa Percetakan	200 lembar		
			Jasa Penggandaan	330.000 lembar				Jasa Penggandaan	330.000 lembar		
			Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	29 jenis				Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	29 jenis		
			Pembayaran telepon	12 jenis				Pembayaran telepon	12 jenis		
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis				Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis		
			Peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis				Peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis		
			Jasa perbaikan perlengkapan kerja	3 jenis				Jasa perbaikan perlengkapan kerja	3 jenis		
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	32 jenis				Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	32 jenis		
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali				Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali		
								Jasa pemeliharaan taman			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor		1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	12 bulan	306.595.210	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor		1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	12 bulan	317.341.712	
			2. Dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	12 bulan				2. Dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	12 bulan		
			3. Jasa Tenaga Bantuan	12 bulan				3. Jasa Tenaga Bantuan	12 bulan		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3		5	6	7	8		10	11	12
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Kelancaran administrasi perkantoran meningkat**	**100%**	**707.736.700**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Kelancaran administrasi perkantoran meningkat**	**100%**	**714.115.670**	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	12 bulan	218.780.250	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	12 bulan	202.522.600	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :		488.956.450	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :		511.593.070	
			a. Roda 4					a. Roda 4			
			b. Roda 2					b. Roda 2			
			c. Roda 3					c. Roda 3			
3	**Program Peningkatann Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Capaian kinerja dan keuangan meningkat**	**100%**	**77.900.000**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Capaian kinerja dan keuangan meningkat**	**100%**	**74.750.000**	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD		1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renja, PK, RKA, DPA)	4 dokumen	77.900.000	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD		1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renja, PK, RKA, DPA)	4 dokumen	74.750.000	
			2. Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, Profil)	B				2. Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, Profil)	4 dokumen		
4	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**		**Prosentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial**	**80%**	**3.688.259.094**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**		**Prosentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial**	**80%**	**1.572.529.755**	
	Kegiatan Perlindungan Sosial		1. Jumlah anak panti asuhan se Kota Yk yg mengikuti forum kreativitas	550 anak	766.977.988	Kegiatan Perlindungan Sosial		1. Jumlah anak panti asuhan se Kota Yk yg mengikuti forum kreativitas	550 anak	766.977.900	
			2. Laporan Hasil evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana Bantuan Korban Bencana	12 kali				2. Laporan Hasil evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana Bantuan Korban Bencana	12 kali		
			3. Jasa piket Tagana	365 hari				3. Jasa piket Tagana	365 hari		
			4. Lanjut Usia Potensial yang mendapat pembinaan	8 kelompok (7 kelompok UEP dan 1 kelompok dalam panti)				4. Lanjut Usia Potensial yang mendapat pembinaan	8 kelompok (7 kelompok UEP dan 1 kelompok dalam panti)		
			5. Jasa Komunikasi Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial	2 kali				5. Jasa Komunikasi Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial	2 kali		
			6. Laporan Pelaksanaan Gebyar Hari Lanjut Usia Kota Yogyakarta	1 kali				6. Laporan Pelaksanaan Gebyar Hari Lanjut Usia Kota Yogyakarta	1 kali		
			7. Laporan Pelaksanaan workshop Komisi Daerah Lansia	15 kali				7. Laporan Pelaksanaan workshop Komisi Daerah Lansia	15 kali		
			8. Pelatihan Tagana	3 kali				8. Pelatihan Tagana	3 kali		
	Kegiatan Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial		1. Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Asistensi Sosial	240 orang	679.733.550	Kegiatan Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial		1. Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Asistensi Sosial	240 orang	-	Tambahan anggaran digunakan untuk membiayai subkegiatan baru yakni Jasa Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi BPNT dan Jasa Pelayanan Pengaduan Subsidi Listrik, meliputi belanja pegawai Timkor BPNT, Timkor Pengaduan Subsidi Listrik dan Rapat Pengaduan Subsidi Listrik
			2. Jasa Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 kali				2. Jasa Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	14 kali		
			3. Santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS yang diberikan	800 orang				3. Jasa Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 kali		
			4. Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	12 bulan				4. Santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS yang diberikan	800 orang		
			5. Jenazah terlantar yang dimakamkan	40 jenazah				5. Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	12 bulan		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3		5	6	7	8		10	11	12
			6. Bantuan biaya pemulangan orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta	125 orang				6. Jenazah Terlantar Yang Dimakamkan	40 jenazah		
								7. Jasa Pelayanan Pengaduan Subsidi Listrik	12 bulan		
								8. Bantuan Biaya Pemulangan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dalam Perjalanan di Kota Yogyakarta	125 orang		
	Kegiatan Pelayanan Anak di RPA Wiloso Projo		Anak terlantar yang dilayani	30 anak	853.483.135	Kegiatan Pelayanan Anak di RPA Wiloso Projo		Anak terlantar yang dilayani	30 anak	853.483.100	
	Kegiatan Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma		Jompo yang dilayani	65 lansia	1.388.064.422	Kegiatan Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma		Jompo yang dilayani	65 lansia	(47.931.245)	tambahan anggaran dipergunakan untuk belanja pegawai, bahan/material, cetak dan penggandaan
	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial		**Prosentase PMKS yang tertangani**	**70%**	**1.273.507.015**	**Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial**		**Prosentase PMKS yang tertangani**	**70%**	**1.712.295.500**	
	Kegiatan Rehabilitasi PMKS		1. Penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha	15 orang	412.605.520	Kegiatan Rehabilitasi PMKS		1. Penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha	15 orang	699.075.700	tambahan anggaran digunakan untuk Penguatan Sosial Psikologis bagi ODHA dan Petugas jaga di titik rawan anjal gepeng, meliputi honorarium, ATK, bahan percontohan, jasa kantor, penggandaan, sewa meja kursi, jamuan sidang dan jasa instruktur
			2. Keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	20 orang				2. Keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	20 orang		
			3. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	30 orang				3. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	30 orang		
			4. Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	30 orang				4. Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	30 orang		
			5. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha	20 orang				5. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha	20 orang		
			6. Anak rentan hidup di jalan yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha	20 orang				6. Anak rentan hidup di jalan yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha	20 orang		
			7. Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis	14 kecamatan				7. Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis	14 kecamatan		
			8. Anak jalanan yang mendapatkan motivasi	60 orang				8. Anak jalanan yang mendapatkan motivasi	60 orang		
			9. Gelandang pengemis yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	20 orang				9. Gelandang pengemis yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	20 orang		
			10. Perempuan rawan sosial ekonomi yang mengikuti pelatihan	20 orang				10. Perempuan rawan sosial ekonomi yang mengikuti pelatihan	20 orang		
			11. Penyandang sakit jiwa yang dikirim ke RS Jiwa	55 orang				11. Penyandang sakit jiwa yang dikirim ke RS Jiwa	55 orang		
								12. ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis	20 orang		
	Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		1. Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	3 kegiatan	860.901.495	Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		1. Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	3 kegiatan	1.013.219.800	
			2. Permohonan alat bantu bagi penyandang disabilitas	8 kali				2. Permohonan alat bantu bagi penyandang disabilitas	8 kali		
			3. Bayi terlantar yang ditangani dan rekomendasi yang diberikan untuk pengangkatan anak	25 anak				3. Bayi terlantar yang ditangani dan rekomendasi yang diberikan untuk pengangkatan anak	25 anak		
			4. Surat rekomendasi bagi PMKS	300 buah				4. Surat rekomendasi bagi PMKS	300 buah		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3		5	6	7	8		10	11	12
			5. Advokasi penanganan PMKS	100 kasus				5. Advokasi penanganan PMKS	100 kasus		Anggaran tambahan dipergunakan untuk membiayai sub kegiatan baru yakni Pendampingan SNPA bagi LKSA, meliputi belanja
			6. KUBE FM yang memperoleh Pembinaan Lanjut (binjut)	10 KUBE FM				6. KUBE FM yang memperoleh Pembinaan Lanjut (binjut)	10 KUBE FM		
			7. Jasa KIE KUBE FM dan USEP KM bagi pengurus	9 kegiatan				7. Jasa KIE KUBE FM dan USEP KM bagi pengurus	9 kegiatan		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3		5	6	7	8		10	11	12
			8. LKM KUBE FM dan USEP KM yng memperoleh pendampingan	6 kegiatan				8. LKM KUBE FM dan USEP KM yng memperoleh pendampingan	6 kegiatan		bag. LKSA, meliputi belanja pegawai, belanja ATK Workshop SNPA dan Workshop Pencegahan Kekerasan pada Anak, belanja dekorasi, belanja cetak, penggandaan, sewa meja kursi, jamuan sidang, transport peserta, jasa narasumber dan moderator.
			9. Pendampingan KUBE FM dan USEP KM	10 bulan				9. Pendampingan KUBE FM dan USEP KM	10 bulan		
			10. Peringatan HDI	1 kegiatan				10. Peringatan HDI	1 kegiatan		
								11. Jasa Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA	13 LKSA		
	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial		**Prosentase PSKS yang aktif**	**80%**	**1.840.875.705**	**Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial**		**Prosentase PSKS yang aktif**	**80%**	**1.926.069.900**	
	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS		1. Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	1 dokumen	1.140.054.435	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS		1. Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	1 dokumen	1.219.071.300	tambahan anggaran digunakan untuk membiayai subkegiatan baru yakni Pemutakhiran Data Penyandang Disabilitas
			2. Data base PSKS	1 dokumen				2. Data base PSKS	1 dokumen		
			3. Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi	1 dokumen				3. Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi	1 dokumen		
								4. Data Penyandang Disabilitas termutakhir	1 dokumen		
	Kegiatan Pemberdayaan Potensi PSKS		1. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Dasar	80 orang	700.821.270	Kegiatan Pemberdayaan Potensi PSKS		1. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Dasar	80 orang	706.998.600	tambahan anggaran digunakan untuk membiayai subkegiatan baru yakni Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan
			2. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Lanjut	80 orang				2. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Lanjut	80 orang		
			3. Pengurus Karang Taruna yang mendapat pelatihan	45 orang				3. Pengurus Karang Taruna yang mendapat pelatihan	45 orang		
			4. Anak tidak mampu yang ikut sunatan massal/HKSN	100 anak				4. Anak tidak mampu yang ikut sunatan massal/HKSN	100 anak		
			5. PSM, Karang Taruna, LKS, TKSK berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta	5 Jenis kejuaraan				5. PSM, Karang Taruna, LKS, TKSK berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta	5 Jenis kejuaraan		
			6. Optimalisasi PSKS dengan :					6. Optimalisasi PSKS dengan :			
			- Peserta Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial	80 orang				- Peserta Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial	80 orang		
			- Karang Taruna yang dibina	45 Kelurahan				- Karang Taruna yang dibina	45 Kelurahan		
			- PSM yang dibina	45 Kelurahan				- PSM yang dibina	45 Kelurahan		
			- LKS yang dibina	30 lembaga				- LKS yang dibina	30 lembaga		
			- WKSBM yang dibina	22 buah				- WKSBM yang dibina	22 buah		
			- TKSK yang dibina	14 orang				- TKSK yang dibina	14 orang		
			- Laporan pelaksanaan Workshop PSKS	1 kegiatan				- Laporan pelaksanaan Workshop PSKS	1 kegiatan		
			- Laporan Pendampingan LOTA Kota Yk	12 bulan				- Laporan Pendampingan LOTA Kota Yk	12 bulan		
			7. KIE LKS Panti se Kota Yogyakarta	1 kegiatan				7. KIE LKS Panti se Kota Yogyakarta	1 kegiatan		
								8. Peserta Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	50 orang		
						HIBAH DAN BANSOS				**889.250.000**	
						Bansos				**761.250.000**	
						IPSM Kota Yk				***227.500.000***	
						Bantuan untuk anak rentan hidup di jalan peserta pelatihan		20 orang x Rp 1.250.000		25.000.000	
						Bantuan untuk gelandangan pengemis peserta pelatihan		20 orang x Rp 1.250.000		25.000.000	
						Bantuan untuk anak klien Bapas peserta pelatihan		30 orang x Rp 1.250.000		37.500.000	
						Bantuan untuk peserta khitanan masal		100 orang x Rp 100.000		10.000.000	
						Fasilitasi alat bantu bagi disabilitas				30.000.000	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3		5	6	7	8		10	11	12
						FKKADK				***43.750.000***	
						Bantuan untuk keluarga dengan anak AD peserta pelatihan		20 orang x Rp 1.250.000		25.000.000	
						Bantuan untuk PD peserta pelatihan		15 orang x Rp 1.250.000		18.750.000	
						LK3 Teratai				***62.500.000***	
						Bantuan untuk keluarga penyandang sakit jiwa peserta pelatihan		30 orang x Rp 1.250.000		37.500.000	
						Bantuan untuk korban tindak kekerasan peserta pelatihan		20 orang x Rp 1.250.000		25.000.000	
						IPSM Kelurahan Giwangan				***25.000.000***	
						Bantuan kepada perempuan rawan sosial ekonomi		20 orang x Rp 1.250.000		25.000.000	
						CD Bethesda				***30.000.000***	
						Bantuan kepada ODHA tidak potensial		10 orang x 10 bulan x Rp 300.000		30.000.000	
						Tagana Kota Yogyakarta				30.000.000	
						UEP Lansia Potensial 7 Kelompok		7 kelompok x Rp 20.000.000		140.000.000	
						Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Yogyakarta				10.000.000	
						Komisi Daerah Lanjut Usia Tingkat Kecamatan (14 Kecamatan)		14 kecamatan x Rp 2.5000.000		35.000.000	
						Komisi Daerah Lanjut Usia Tingkat Kelurahan (45 Kelurahan)		45 kelurahan x Rp 3.500.000		157.500.000	
						Hibah				**128.000.000**	
						PSM Kota Yogyakarta				15.000.000	
						K3S Kota Yogyakarta				15.000.000	
						LK3 Sekar Melati				18.000.000	
						Karang Taruna Kota Yogyakarta				30.000.000	
						DHC 45 Kota Yogyakarta				50.000.000	
JUMLAH					**8.790.824.757**					**9.994.393.515**	